

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Achmad Ali dalam Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014).
- Achmad Chomzah, Ali. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003).
- Bahry, Zainul. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. (Bandung : Angkasa, 1996).
- Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. (Yogyakarta : Thafa Media, 2014).
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 1994).
- _____. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi Cetakan Keduabelas. (Jakarta : Djambatan, 2008).
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2011).
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Joses Sembiring, Jimmy. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. (Jakarta : Visimedia, 2010).
- M. Yamin Lubis dan A. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008).

- Muchsin, et.al. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Cetakan Kedua. (Bandung : Refika Aditama, 2010).
- N Kerlinger, Fred. *Asas – Asas Penelitian Behaviorial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Ngr Wisnu Permadi, A.A, dkk. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah*. (Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perpesktif Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rusman Murad dalam Adrian Sutedi. *Sertipikat Hak Atas Tanah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Paringin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993).
- Perangin, Effendi. *Praktek Permohonan Hak atas Tanah, Rajawali*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1991).
- Pramadnya Puspa, Yan. *Kamus Hukum*. (Semarang : Aneka Ilmu, 1977).
- S.W. Sumardjono, Maria. *Transitional Justice Atas Hak Sumber Daya Alam*, dalam Komnas HAM, *Keadilan Dalam Masa Transisi*. (Jakarta : 2001).
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. (Malang : Setara Press, 2011).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumardjono S. W., Maria. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*. (Jakarta : Kompas, 2007).
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018).
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pembatalan Keputusan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/K/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994

Surat Keputusan Gubernur Daerah Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988, dengan Nomor SK : DA.II/HP/958/3/950/88 diktum 6

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
026/G/2016/PTUN.Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
40/B/2017/PT.TUN.SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2018

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adrian Sutedi dalam Puti Asih Febiola. *Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Terhadap Gugatan Dari Pihak Lain*, (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. (Jakarta : 1973).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016).

Mulyata, Jaka. *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Tesis Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015).

Rahmadhani, Rahmat. *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*. De Lega Lata, Bolume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Sukanti Hutagalung, Arie. *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok : 2003).